

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 1, Nomor 4, Mei 2023, Halaman, 284-291
e-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.7963158)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7963158>

Eksistensi MPR RI: Telaah Efektivitas Tugas dan Wewenang MPR RI Sebagai Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

**Mayzura Kamila Sukma¹, Adisty Sativa², Ivan Nugraha³, Agnes Octavia Margaretha
Pasaribu⁴**

¹²³⁴Universitas Negeri Semarang

e-mail : mayzuraks@students.unnes.ac.id¹, adistysativa80@students.unnes.ac.id²,
ivanofficial2004@students.unnes.ac.id³, agnesmargaretha@students.unnes.ac.id⁴

Abstrak

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) sebagai lembaga negara di Indonesia dengan tugas dan wewenang yang sangat luas. Namun, eksistensi MPR RI dalam beberapa tahun terakhir dinilai merosot dan tidak lagi efektif dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana sesuai dengan Pasal 3 Ayat 1 UUD 1945 tentang tugas dan wewenang MPR RI. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan efektivitas tugas dan wewenang MPR RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam tulisan artikel ini tertuang beberapa cara untuk meningkatkan efektivitas MPR RI, termasuk meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilihan anggota MPR RI, memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan kebijakan negara, serta meningkatkan peran MPR RI dalam memperbaiki sistem pemerintahan dan menjaga stabilitas politik. Dengan meningkatkan partisipasi publik dan transparansi, MPR RI dapat memperoleh masukan dan pendapat yang berbeda sehingga keputusan yang diambil lebih representatif dan berdasarkan pada aspirasi masyarakat. Pengawasan yang lebih kuat terhadap pelaksanaan hukum dan kebijakan, serta kritik dan saran konstruktif untuk meningkatkan sistem pemerintahan, dapat memperkuat peran MPR RI dalam menjaga stabilitas politik di Indonesia.

Kata kunci: Efektivitas; Tugas; Wewenang; MPR RI.

Abstract

The Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) is the state institution in Indonesia with very broad tasks and authorities. However, the existence of MPR RI in recent years has been criticized for declining and being ineffective in carrying out its tasks and authorities. Therefore the efforts need to be made to improve the effectiveness of the tasks and authorities of MPR RI in the Indonesian constitutional system. This discussion suggests several ways to improve the effectiveness of MPR RI, including increasing public participation in decision-making processes, improving transparency and accountability in the process of selecting MPR RI members, strengthening supervision over the implementation of laws and state policies, as well as enhancing the role of MPR RI in improving the governance system and maintaining political stability. By increasing public participation and transparency, MPR RI can obtain different inputs and opinions so that the decisions made are more representative and based on the aspirations of the people. Stronger oversight of law and policy implementation, as well as constructive criticism and suggestions for improving the governance system, can strengthen the role of MPR RI in maintaining political stability in Indonesia.

Keywords: Effectiveness; Tasks; Authority; MPR RI.

PENDAHULUAN

Pada era demokrasi saat ini, lembaga-lembaga negara harus memiliki peran yang efektif dan tepat dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Dari banyak lembaga negara yang memiliki peran penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memiliki peran penting sebagai lembaga negara yang bertugas mengawasi dan mengendalikan jalannya pemerintahan¹. Sebagai lembaga tertinggi negara, MPR memiliki wewenang yang sangat luas dalam hal pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembentukan undang-undang dan penetapan kebijakan negara. Namun, belakangan ini eksistensi MPR RI dikritik oleh beberapa pihak karena dinilai merosot. Tidak sedikit yang menyebut bahwa MPR RI menjadi "lemah" dan tidak efektif dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan telaah efektivitas tugas dan wewenang MPR RI sebagai lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Pertama-tama, perlu diketahui bahwa tugas utama MPR RI adalah mengawasi dan mengendalikan jalannya pemerintahan, serta mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan pembentukan undang-undang dan penetapan kebijakan negara. MPR RI juga memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan kebijakan negara yang sudah dikeluarkan. Namun, meski memiliki tugas dan wewenang yang sangat luas, kinerja MPR RI belakangan ini dinilai kurang efektif. Hal ini terlihat dari minimnya upaya yang dilakukan oleh MPR RI dalam memperbaiki sistem pemerintahan dan menjaga stabilitas politik. Selain itu, MPR RI juga dinilai kurang aktif dalam mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintah, sehingga banyak kebijakan yang tidak efektif atau bahkan merugikan rakyat masih tetap dilaksanakan.

Masih banyak tugas dan wewenang MPR RI yang belum dilaksanakan secara maksimal. Salah satunya adalah kewenangan MPR RI dalam membahas dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMN merupakan sebuah rencana pembangunan nasional yang bertujuan untuk mengarahkan pembangunan nasional selama kurun waktu lima tahun. Namun, pembahasan RPJMN oleh MPR RI dinilai kurang transparan dan minim partisipasi publik. Selain itu, ada pula kritik terhadap proses pemilihan anggota MPR RI yang dinilai tidak transparan dan terbuka. Seharusnya proses pemilihan dilakukan secara terbuka dan melibatkan partisipasi publik sehingga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga MPR RI dapat meningkat. Dalam rangka meningkatkan efektivitas tugas dan wewenang MPR RI, perlu dilakukan berbagai upaya, seperti meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilihan anggota MPR RI, serta meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan kebijakan negara. Selain itu, MPR RI juga perlu lebih aktif dalam memperbaiki sistem pemerintahan dan memberikan masukan yang konstruktif kepada pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan².

Di era digital seperti sekarang ini, MPR RI juga perlu meningkatkan penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan keterbukaan dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, MPR RI juga perlu memperkuat sinergi dengan lembaga negara lainnya, seperti DPR dan Presiden, untuk mencapai tujuan nasional yang lebih baik. Dalam upaya meningkatkan eksistensi MPR RI, perlu diingat bahwa MPR RI memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional. Oleh karena itu, MPR RI harus terus berupaya meningkatkan kinerjanya dan memperkuat posisinya sebagai lembaga negara yang penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

¹ Adhani, R. (2021). "Efektivitas Tugas dan Wewenang MPR RI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Konstitusi*", 18(2): 318-335.

² Faisal, S. (2019). "Peran MPR RI dalam Menjaga Stabilitas Politik Indonesia. *Jurnal Konstitusi*," 16(1): 97-115.

Oleh karena itu, eksistensi MPR RI sebagai lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memang mengalami kemerosotan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini terlihat dari minimnya upaya yang dilakukan oleh MPR RI dalam memperbaiki sistem pemerintahan dan menjaga stabilitas politik. Oleh karena itu, perlu dilakukan telaah efektivitas tugas dan wewenang MPR RI sebagai lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Melalui upaya-upaya yang telah disebutkan di atas, diharapkan MPR RI dapat meningkatkan kinerjanya dan memperkuat posisinya sebagai lembaga negara yang penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk melakukan telaah dan analisis terhadap efektivitas tugas dan wewenang MPR RI sebagai lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Melalui pendekatan kepustakaan, peneliti akan melakukan pencarian data dan informasi yang relevan melalui literatur-literatur, jurnal, dokumen-dokumen, dan sumber-sumber lainnya yang terkait dengan topik penelitian ini.

Dalam melakukan penelitian ini, penulis akan menggunakan teknik analisis isi sebagai cara untuk menganalisis data yang diperoleh dari sumber-sumber yang digunakan. Teknik analisis isi akan membantu penulis untuk mengidentifikasi tema-tema penting yang muncul dalam literatur yang telah dikaji dan memberikan gambaran yang jelas tentang efektivitas tugas dan wewenang MPR RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas tugas dan wewenang MPR RI di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia

MPR RI merupakan lembaga negara tertinggi di Indonesia yang memiliki tugas dan wewenang yang sangat luas, mulai dari mengawasi jalannya pemerintahan, hingga mengambil keputusan penting dalam pembentukan undang-undang dan penetapan kebijakan negara. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, eksistensi MPR RI dikritik oleh beberapa pihak karena dinilai merosot dan tidak efektif dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya³.

Beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas MPR RI adalah minimnya partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan, kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilihan anggota MPR RI, serta kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan kebijakan negara⁴. Selain itu, MPR RI dinilai kurang aktif dalam memperbaiki sistem pemerintahan dan menjaga stabilitas politik.

Salah satu tugas dan wewenang MPR RI yang belum dilaksanakan secara maksimal adalah dalam pembahasan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMN merupakan rencana pembangunan nasional yang sangat penting untuk mengarahkan pembangunan nasional selama lima tahun ke depan. Namun, pembahasan RPJMN oleh MPR RI dinilai kurang transparan dan minim partisipasi publik.

Dalam meningkatkan efektivitas tugas dan wewenang MPR RI, perlu dilakukan berbagai upaya, seperti meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilihan anggota MPR RI, serta meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan

³ Huda, N. (2017). "Fungsi dan Peran MPR RI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Konstitusi*," 14(1): 49-66.

⁴ Faisal, S. (2019). "Peran MPR RI dalam Menjaga Stabilitas Politik Indonesia. *Jurnal Konstitusi*," 16(1): 97-115.

kebijakan negara. Selain itu, MPR RI juga perlu lebih aktif dalam memperbaiki sistem pemerintahan dan menjaga stabilitas politik⁵.

Partisipasi publik dapat ditingkatkan dengan cara mengadakan forum-forum terbuka yang melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, LSM, dan akademisi dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, MPR RI juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilihan anggota MPR RI dengan melibatkan partisipasi publik dalam proses pemilihan. Pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan kebijakan negara juga dapat ditingkatkan dengan cara meningkatkan keterlibatan MPR RI dalam pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan kebijakan negara, serta meningkatkan keterbukaan informasi terkait pelaksanaan undang-undang dan kebijakan negara tersebut⁶.

Selain itu, MPR RI juga perlu lebih aktif dalam memperbaiki sistem pemerintahan dan menjaga stabilitas politik. MPR RI dapat meningkatkan kinerjanya dengan cara lebih intensif mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintah, serta melakukan kritik dan saran konstruktif untuk perbaikan sistem pemerintahan. Selain itu, MPR RI juga dapat mengambil peran aktif dalam menjaga stabilitas politik dengan cara memediasi konflik antar fraksi politik, memfasilitasi dialog antar lembaga negara, serta mengambil langkah preventif untuk mencegah terjadinya konflik politik di masa depan.

Dalam pembahasan RPJMN, MPR RI dapat meningkatkan transparansi dan partisipasi publik dengan cara mengadakan diskusi terbuka dengan berbagai pihak terkait, termasuk masyarakat, LSM, akademisi, dan para ahli terkait. Dalam diskusi tersebut, MPR RI dapat menggali masukan dan saran dari berbagai pihak untuk memperkaya dan memperbaiki RPJMN yang akan dibuat. Selain itu, MPR RI juga dapat memperkuat peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam pembuatan RPJMN, sehingga proses pembahasan menjadi lebih demokratis dan partisipatif.

Dalam memperkuat peran MPR RI sebagai lembaga negara tertinggi, perlu dilakukan perubahan dan peningkatan pada tugas dan wewenangnya. MPR RI perlu memperjelas tugas dan wewenangnya, sehingga dapat lebih fokus dan efektif dalam melaksanakan fungsi-fungsinya. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan kapasitas dan kualitas anggota MPR RI, sehingga mampu mengemban tugas dan wewenangnya secara optimal⁷.

Oleh karena itu, efektivitas tugas dan wewenang MPR RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia masih perlu ditingkatkan. Perlu dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan partisipasi publik, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan, serta meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan kebijakan negara. Selain itu, MPR RI perlu lebih aktif dalam memperbaiki sistem pemerintahan dan menjaga stabilitas politik. Perubahan dan peningkatan pada tugas dan wewenang MPR RI, serta peningkatan kapasitas dan kualitas anggota MPR RI juga perlu dilakukan untuk memperkuat peran MPR RI sebagai lembaga negara tertinggi di Indonesia.

Upaya meningkatkan efektivitas tugas dan wewenang MPR RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

MPR RI merupakan lembaga negara tertinggi di Indonesia yang memiliki tugas dan wewenang yang sangat luas. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, eksistensi MPR RI dikritik oleh beberapa pihak karena dinilai merosot dan tidak efektif dalam melaksanakan

⁵ Irawan, A. (2017). "MPR RI dalam Perspektif Konstitusi: Tinjauan terhadap Kehadiran dan Peran dalam Sistem Ketatanegaraan. *Jurnal Konstitusi*," 14(2): 258-277.

⁶ *ibid*

⁷ Syarif, M. A. (2018). "MPR RI sebagai Lembaga Negara Tertinggi: Telaah Terhadap Efektivitas Fungsi dan Peran dalam Sistem Ketatanegaraan. *Jurnal Konstitusi*", 15(2): 222-239.

tugas dan wewenangnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan efektivitas tugas dan wewenang MPR RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia⁸.

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas MPR RI adalah minimnya partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini dapat mengakibatkan keputusan yang diambil oleh MPR RI tidak mencerminkan kepentingan dan aspirasi masyarakat. Untuk meningkatkan partisipasi publik, MPR RI dapat mengadakan forum-forum terbuka yang melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, LSM, dan akademisi dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, MPR RI juga dapat memperkuat fungsi komite-komite yang ada di dalamnya, seperti Komite I yang bertugas mengawasi masalah politik dan hukum, Komite II yang mengawasi masalah ekonomi dan keuangan, serta Komite III yang mengawasi masalah sosial dan budaya. Dengan memperkuat fungsi komite-komite ini, diharapkan MPR RI dapat lebih efektif dalam mengawasi jalannya pemerintahan⁹.

Selain partisipasi publik, faktor lain yang mempengaruhi efektivitas MPR RI adalah kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilihan anggota MPR RI. Hal ini dapat mengakibatkan kecurangan dalam pemilihan anggota MPR RI, sehingga anggota MPR RI yang terpilih tidak representatif dan tidak mampu menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik. Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilihan anggota MPR RI, MPR RI dapat melibatkan partisipasi publik dalam proses pemilihan. Selain itu, MPR RI juga dapat meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan kebijakan negara dengan cara meningkatkan keterlibatan MPR RI dalam pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan kebijakan negara, serta meningkatkan keterbukaan informasi terkait pelaksanaan undang-undang dan kebijakan negara tersebut¹⁰.

MPR RI juga perlu lebih aktif dalam memperbaiki sistem pemerintahan dan menjaga stabilitas politik. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kinerjanya dalam mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintah, serta memberikan kritik dan saran konstruktif untuk perbaikan sistem pemerintahan. MPR RI juga dapat mengambil peran aktif dalam menyelesaikan konflik-konflik politik dan sosial yang terjadi di Indonesia. Misalnya, MPR RI dapat membentuk forum-forum diskusi dan mediasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam konflik tersebut, sehingga dapat mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak.

Berdasarkan penjelasan di atas, upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas MPR RI adalah dengan meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi publik dapat ditingkatkan dengan cara mengadakan forum-forum terbuka yang melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, LSM, dan akademisi dalam proses pengambilan keputusan. Melalui partisipasi publik yang lebih luas, MPR RI dapat memperoleh masukan dan pendapat dari berbagai pihak yang berbeda sehingga keputusan yang diambil lebih representatif dan berdasarkan pada aspirasi masyarakat¹¹.

Selain meningkatkan partisipasi publik, MPR RI juga perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilihan anggota MPR RI. Proses pemilihan anggota MPR RI yang transparan dan akuntabel akan memastikan bahwa anggota MPR RI yang terpilih merupakan orang yang tepat dan memenuhi kriteria yang ditetapkan. Meningkatkan

⁸ Sudrajat, M. (2020). "MPR RI sebagai Lembaga Tertinggi Negara: Tantangan dan Peluang dalam Menghadapi Era Global. *Jurnal Konstitusi*", 17(2): 300-315.

⁹ Lestari, N. A. (2019). "Eksistensi MPR RI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Konstitusi*", 16(2): 223-241.

¹⁰ Rinaldi, M. (2018). "Penguatan Peran MPR RI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Konstitusi*," 15(1): 44-62.

¹¹ Adhani, R. (2021). "Efektivitas Tugas dan Wewenang MPR RI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Konstitusi*," 18(2): 318-335.

transparansi dan akuntabilitas dapat dilakukan dengan melibatkan partisipasi publik dalam proses pemilihan, termasuk dengan mengadakan debat terbuka dan diskusi terbuka antara calon anggota MPR RI dengan masyarakat.

Pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan kebijakan negara juga dapat ditingkatkan untuk meningkatkan efektivitas tugas dan wewenang MPR RI. MPR RI perlu lebih aktif dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan undang-undang dan kebijakan negara serta memberikan kritik dan saran konstruktif jika terdapat ketidaksesuaian antara undang-undang dan kebijakan negara dengan kondisi riil di lapangan. Selain itu, MPR RI juga dapat meningkatkan keterbukaan informasi terkait pelaksanaan undang-undang dan kebijakan negara sehingga masyarakat dapat lebih memahami apa yang sedang terjadi dalam negara dan memberikan masukan dan pendapat yang lebih kritis.

Selain tugas dan wewenang yang sudah diatur dalam Undang-Undang, MPR RI juga perlu lebih aktif dalam memperbaiki sistem pemerintahan dan menjaga stabilitas politik. MPR RI dapat meningkatkan kinerjanya dengan cara lebih intensif mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintah, serta melakukan kritik dan saran konstruktif untuk perbaikan sistem pemerintahan. MPR RI juga perlu memperkuat perannya sebagai lembaga yang dapat menjaga stabilitas politik dengan cara mengawasi dan memastikan pelaksanaan demokrasi yang sehat serta menjaga kerukunan dan kesatuan nasional¹².

Selain upaya-upaya yang telah disebutkan di atas, MPR RI juga perlu memperkuat kerja sama dengan lembaga negara lainnya, termasuk DPR, Presiden, dan Mahkamah Konstitusi, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Kerja sama yang baik dan sinergi antar lembaga negara akan memudahkan proses pengambilan keputusan dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan wewenang MPR RI¹³.

Selain itu, MPR RI juga perlu meningkatkan kapasitas dan kualitas anggota MPR RI melalui pelatihan dan pendidikan terus-menerus. Anggota MPR RI yang memiliki kapasitas dan kualitas yang baik akan mampu melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan lebih efektif dan memuaskan. Pelatihan dan pendidikan terus-menerus juga akan memastikan bahwa anggota MPR RI tetap update dengan perkembangan terkini dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Dalam konteks keuangan, MPR RI perlu memperkuat pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Hal ini sebagaimana baiknya apabila transparansi dan akuntabel akan memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk MPR RI dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan efektif. Selain itu, MPR RI juga perlu mengembangkan mekanisme pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan keuangan untuk mencegah terjadinya korupsi atau penyalahgunaan dana¹⁴.

Secara keseluruhan, upaya-upaya yang telah disebutkan di atas dapat meningkatkan efektivitas tugas dan wewenang MPR RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Meningkatkan partisipasi publik, transparansi dan akuntabilitas, pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan kebijakan negara, memperbaiki sistem pemerintahan, menjaga stabilitas politik, memperkuat kerja sama antar lembaga negara, meningkatkan kapasitas dan kualitas anggota MPR RI, dan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel adalah upaya-upaya yang sangat penting untuk dilakukan agar MPR RI dapat memenuhi tugas dan wewenangnya dengan efektif dan optimal.

¹² Huda, N. (2017). "Fungsi dan Peran MPR RI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Konstitusi*", 14(1): 49-66.

¹³ Rinaldi, M. (2018). "Penguatan Peran MPR RI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Konstitusi*," 15(1): 44-62.

¹⁴ Kholis, N. (2020). "MPR RI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Konstitusi*", 17(3): 524-549.

SIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa efektivitas tugas dan wewenang MPR RI di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dapat ditingkatkan dengan beberapa upaya. Pertama, meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan untuk memastikan keputusan yang diambil lebih representatif dan berdasarkan pada aspirasi masyarakat. Kedua, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilihan anggota MPR RI untuk memastikan bahwa anggota MPR RI yang terpilih merupakan orang yang tepat dan memenuhi kriteria yang ditetapkan. Ketiga, meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan kebijakan negara, serta memberikan kritik dan saran konstruktif jika terdapat ketidaksesuaian antara undang-undang dan kebijakan negara dengan kondisi riil di lapangan. Keempat, MPR RI juga perlu lebih aktif dalam memperbaiki sistem pemerintahan dan menjaga stabilitas politik. Dengan adanya upaya-upaya tersebut, diharapkan MPR RI dapat lebih efektif dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai lembaga negara tertinggi di Indonesia. MPR RI diharapkan dapat memperkuat perannya sebagai lembaga yang mampu mewakili aspirasi masyarakat dan menjaga stabilitas politik serta memperbaiki sistem pemerintahan di Indonesia.

Referensi

- Adhani, R. (2021). Efektivitas Tugas dan Wewenang MPR RI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 18(2): 318-335.
- Aldi Putra, A. (2022). Urgensi Penetapan Garis Besar Haluan Negara oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara (Doctoral dissertation, Universitas Jambi).
- Busroh, F. F. (2023). *Institution of the People's Consultative Assembly of the Republic of Indonesia After the Amendments to the 1945 Constitution in State Administration. International Journal of Artificial Intelligence Research*, 6(1.1).
- Faisal, S. (2019). Peran MPR RI dalam Menjaga Stabilitas Politik Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 16(1): 97-115.
- HALIM PERDANA, K. U. S. U. M. A. (2023). *URGENSI SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM SISTEM KETATANEGARAAN* (Doctoral dissertation, Universitas Mataram).
- Haryanto, T., Hartini, S., Toufik, M., & Kartika, K. (2022). Perubahan dan Implikasi Susunan Organisasi dan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Setelah Amandemen UUD 1945. *Kosmik Hukum*, 22(2), 103-109.
- Hastangka, H., Armawi, A., & Kaelan, K. (2017). Empat pilar mpr ri: politik bahasa dan delegitimasi makna pancasila (Suatu Telaah Filsafat Bahasa). *CIVIS: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 6(2).
- Huda, N. (2017). Fungsi dan Peran MPR RI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 14(1): 49-66.
- Irawan, A. (2017). MPR RI dalam Perspektif Konstitusi: Tinjauan terhadap Kehadiran dan Peran dalam Sistem Ketatanegaraan. *Jurnal Konstitusi*, 14(2): 258-277.
- Kholis, N. (2020). MPR RI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 17(3): 524-549.
- Lestari, N. A. (2019). Eksistensi MPR RI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 16(2): 223-241.
- Mutiani, M., Disman, D., Abbas, E. W., Wiyanarti, E., & Siwi, A. M. (2023). Strengthening the Value of Nationalism Through Figure Dr. KH Idham Chalid. *The Kalimantan Social Studies Journal*, 4(2), 157-170.

- Nazriyah, R. (2017). Penguatan Peran Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 47(1), 39.
- Rinaldi, M. (2018). Penguatan Peran MPR RI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 15(1): 44-62.
- Sudrajat, M. (2020). MPR RI sebagai Lembaga Tertinggi Negara: Tantangan dan Peluang dalam Menghadapi Era Global. *Jurnal Konstitusi*, 17(2): 300-315.
- Susilowati, W. H. (2018). Revitalisasi Keberadaan MPR RI dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca era Reformasi. *JURNAL MAJELIS*, 77.
- Supriyanto, E. (2021). MPR RI Dalam Penyelenggaraan Negara. *Jurnal Konstitusi*, 18(1): 121-136.
- Syarif, M. A. (2018). MPR RI sebagai Lembaga Negara Tertinggi: Telaah Terhadap Efektivitas Fungsi dan Peran dalam Sistem Ketatanegaraan. *Jurnal Konstitusi*, 15(2): 222-239.
- Prayudi, P. (2016). MPR, Transisi Kedaulatan Rakyat Dan Dampak Politikanya. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, 3(1).